

BAB I

PENDAHULUAN

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, adalah merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang menggunakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan kemandirian lokal serta untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah berdasarkan sumber daya yang ada serta tetap dikonstruksikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berangkat dari asumsi di atas, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah suatu rangkaian dari bagian yang tidak terpisahkan dengan tugas-tugas Kecamatan yang merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah dimana Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan pada tingkat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai beberapa kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Kecamatan. Kewenangan tersebut berupa program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan itu sendiri. Perubahan fungsi kecamatan memungkinkan dilaksanakannya beberapa kegiatan yang sifatnya lintas sektor sebagai perpanjangan jalur koordinasi dengan dinas-dinas terkait.

Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 telah banyak memberikan perkembangan yang cukup signifikan namun bukan berarti kegiatan yang dilaksanakan tidak berlanjut lagi. Hasil yang telah diperoleh diharapkan ada peningkatan dari tahun ketahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis kecamatan sebagai tindaklanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tingkat Kabupaten.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kecamatan Pasimarannu menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepada Bupati dengan memperhatikan kondisi wilayah dan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam Wilayah Kecamatan.

1.1. Gambaran Umum OPD

Gambar 1
Kantor Kecamatan Pasimarannu



Pasimarannu adalah salah satu dari sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pasimarannu berjarak sekitar 119 mil dari Kota Benteng dengan waktu tempuh perjalanan laut $\pm$ 12 Jam. Pusat Pemerintahan Kecamatan Pasimarannu dilaksanakan di Kantor

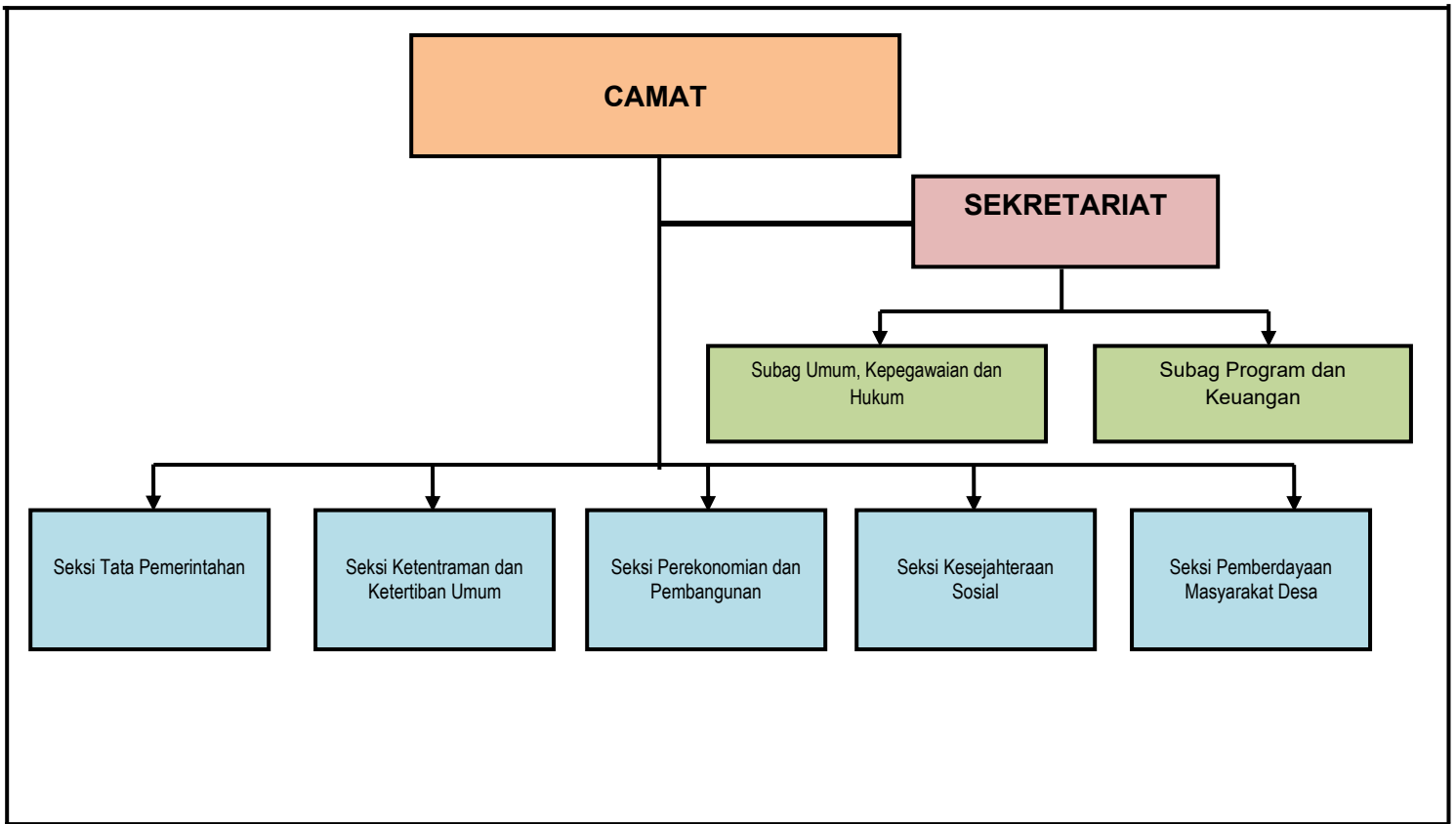
Kecamatan yang beralamat di Jln. Majapahit No. 356 Bonerate Kode Pos 92862 (email : kecamatanpasimarannubonerate@gmail.com). Titik Koordinat Kantor Kecamatan Pasimarannu : **-7.359951,121.086003**. Kecamatan Pasimarannu terdiri dari 8 (delapan) Desa dan 26 (dua puluh enam) Dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut, yaitu :

No.	Desa	Jml KK	Lk	Pr	Jml
1.	Bonerate	487	724	783	1507
2.	Majapahit	778	1115	1275	2390
3.	Lamantu	435	716	773	1489
4.	Batu Bingkung	441	691	692	1383
5.	Bonea	372	496	590	1086
6.	Sambali	367	597	621	1218
7.	Lambego	274	457	507	964
8.	Komba-Komba	207	365	340	705
Jumlah		3.362	5.161	5.581	10.742

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pasimarannu dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun susunan Organisasi Kecamatan Pasimarannu adalah sebagai berikut :

Gambar 2
Struktur Organisasi Kecamatan Pasimarannu



Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, dijelaskan bahwa kecamatan dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (pasal 4). Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksudkan dalam pasal 4 tersebut, kecamatan sebagaimana diuraikan pasal 4 mempunyai tugas dan fungsi :

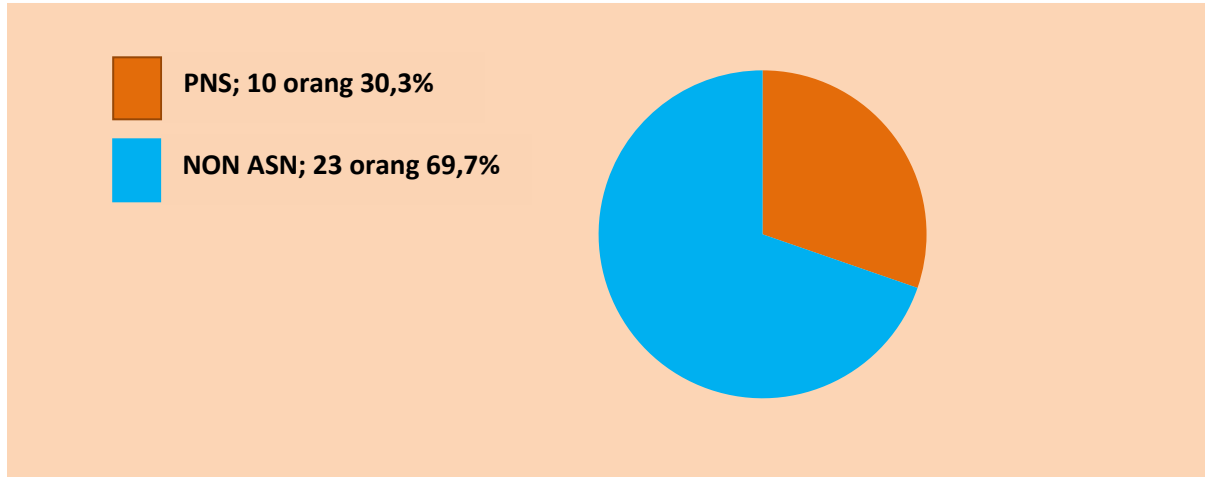
- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyeleggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
 - d. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.

Sumber Daya Manusia menjadi kunci kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerja sama antar manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan sistem yang ada dalam organisasi akan bermuara pada 1 (satu) sumber, yaitu Manusia. Memang sulit untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang dalam sebuah organisasi, khususnya organisasi publik. Namun beberapa standar umum yang dapat digunakan dalam penulisan ini antara lain jumlah pegawai, tingkat pendidikan dan kepangkatan. Dilihat dari perspektif Sumber Daya Manusia sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Kecamatan Pasimarannu didukung sumber daya manusia sebanyak 33 orang yang terdiri dari 10 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 23 Orang berstatus Non ASN.

Gambar 3
Kondisi SDM Kecamatan Pasimarannu
Berdasarkan Status Kepegawaian



Tabel 1
Data Pegawai Kecamatan Pasimarannu
Tahun 2021

NO.	NAMA PEGAWAI / NIP	JABATAN
1.	SYAMSIL, S.Sos Pangkat : Pembina, IV/a NIP : 19680204 198903 1 009	CAMAT
2.	RAHMAT KARYADI YUSUF, S.Pi, M.M Pangkat : Pembina, IV/a NIP : 19790205 200604 1 021	SEKRETARIS
3.	ABD. HAMID, S.KM Pangkat : Penata, III/c NIP : 19730110 199403 1 003	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
4.	SAMSUDDIN, S.T Pangkat : Penata, III/c NIP : 19760218 200003 1 004	KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5.	ANDI ABRIADIE, S.Sos.	KASUBAG PROGRAM DAN

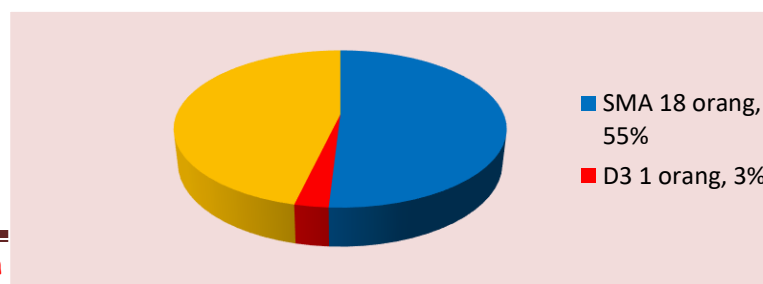
	Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b NIP : 19661005 199103 1 010	KEUANGAN
6.	RAIL, SE Pangkat : Penata Muda, III/a NIP : 19750815 200906 1 002	KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
7.	MUHAMMAD KASIM, A.Md Pangkat : Pengatur Tk. I, II/d NIP : 19780328 201212 1 001	STAF
8.	MUH. TAHIR, P. Pangkat : Pengatur Muda Tk. I, II/b NIP : 19711021 200701 1 021	STAF
9.	ROSDALINA Pangkat : Pengatur Muda, II/a NIP : 19740721 201001 2 002	STAF
10.	BASRI Pangkat : Pengatur, II/d NIP : 19690701 200906 1 006	STAF
11.	NUR LAELA	PHL
12.	SUKMAWAN	PHL
13.	ROSMAWATI, S.Pd	PHL
14.	UCIARNI, S.Pd.I	PHL
15.	ARIFIN ADAM	PHL
16.	ABDULLAH	PHL
17.	HAPSARI	PHL
18.	SAMIATI	PHL
19.	NURJANNAH	PHL

20.	NURHAYATI	PHL
21.	MULIANA, SE	PHL
22.	FARIDAWATI ASIS, SE	PHL
23.	MUH. NUR ASLI	PHL
24.	SITI HAJAR, SE	PHL
25.	MIKIAL, SE	PHL
26.	NUR HIDAYAH, S.Sos	PHL
27.	NORMAN QADDAS, S.Kom	PHL
28.	SALFIANA, S.E	PHL
29.	ISHAK, S.E	PHL
30.	NUR FITRAH	PHL
31.	MULIATI	HONORER
32.	HIJRIANTI, SE	HONORER
33.	HUMAIDA TUZZAHRA, S.Ak	HONORER

Dari total jumlah SDM tersebut, 18 orang atau 55% berpendidikan S.1, 1 orang atau 3% berpendidikan D3, dan 14 orang atau 42% berpendidikan SMA.

Gambar 4

Komposisi SDM Kecamatan Pasimarannu Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sementara itu, dari sembilan jabatan struktural yang ada berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, hanya lima jabatan struktural yang terisi yaitu Camat, Sekretaris, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan. Empat jabatan lainnya masih lowong hingga saat ini.

Tabel 2

Jumlah Jabatan Struktural Kecamatan Pasimarannu Tahun 2021

NO.	JABATAN STRUKTURAL	ESELON				JUMLAH	KET.
		III a	IIIb	IVa	IVb		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terisi	1	1	1	2	5	
2.	Lowong	-	-	4	-	4	
Jumlah						9	

Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan harus memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Pasimarannu	Renja Tahun 2022	I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	97,88 %			
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran			
					Rp. 1.620.075.400,00	Rp. 1.581.583.684,00			
				1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
					Rp. 24.697.000,00	Rp. 24.697.000,00			
				a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	100 %			
					2 Dokumen	2 Dokumen			
					Rp. 12.306.000,00	Rp. 12.306.000,00			
				b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100 %	100 %			
					2 Dokumen	2 Dokumen			
					Rp. 12.391.000,00	Rp. 12.391.000,00			
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	96 %			
					Rp. 982.604.000,00	Rp. 944.112.284,00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 % 12 Bulan	96 % 12 Bulan			
					Rp. 977.453.000,00	Rp. 938.961.284,00			
				b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 % 3 Dokumen	100 % 3 Dokumen			
					Rp. 5.151.000,00	Rp. 5.151.000,00			
				3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %			
					Rp. 5.322.000,00	Rp. 5.322.000,00			
				a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	100 %			
					Rp. 5.322.000,00	Rp. 5.322.000,00			
				4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			
					Rp. 428.398.400,00	Rp. 428.398.400,00			
				a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 % 1 Unit	100 % 1 Unit			
					Rp. 168.683.000,00	Rp. 168.683.000,00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %			
					Rp. 4.407.400,00	Rp. 4.407.400,00			
				c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %			
					12 Bulan	12 Bulan			
					Rp. 7.080.000,00	Rp. 7.080.000,00			
				d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %			
					Rp. 248.228.000,00	Rp. 248.228.000,00			
				5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
					Rp. 121.294.000,00	Rp. 121.294.000,00			
				a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %			
					12 Bulan	12 Bulan			
					Rp. 16.302.000,00	Rp. 16.302.000,00			
				b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %			
					12 Bulan	12 Bulan			
					Rp. 104.992.000,00	Rp. 104.992.000,00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % Rp. 57.760.000,00	100 % Rp. 57.760.000,00			
				a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 % 12 Bulan Rp. 10.010.000,00	100 % 12 Bulan Rp. 10.010.000,00			
				b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 % 12 Bulan Rp. 3.100.000,00	100 % 12 Bulan Rp. 3.100.000,00			
				c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 % 2 Unit Rp. 44.650.000,00	100 % 2 Unit Rp. 44.650.000,00			
				II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 % Alokasi Anggaran Rp. 185.003.000,00	100 % Realisasi Anggaran Rp. 185.003.000,00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %			
					Rp. 185.003.000,00	Rp. 185.003.000,00			
				a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %	100 %			
					8 Desa	8 Desa			
					Rp. 35.794.000,00	Rp. 35.794.000,00			
				b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %			
					12 Bulan	12 Bulan			
					Rp. 149.209.000,00	Rp. 149.209.000,00			
				III. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %	100 %			
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran			
					Rp. 9.600.000,00	Rp. 9.600.000,00			
				1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*****)	100 %	100 %			
					Rp. 9.600.000,00	Rp. 9.600.000,00			
				a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	100 %	100 %			
					12 Bulan	12 Bulan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*****)	Rp. 9.600.000,00	Rp. 9.600.000,00			

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6
1	Urusan Kewilayahan					
	Kecamatan Pasimarannu					
	1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	%	100	73	73	
	2. Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	%	100	91	91	
	3. Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	%	100	85	85	

2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6

2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian RealisasiA nggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	$5=4-3$	$6=(4/3)*100$	7	8	9	10
1	Urusan Kewilayahan								
.	Kecamatan Pasimarannu	Rp. 1.814.678.400,-	Rp. 1.776.186.684,-	Rp. 38.491.716,-	97,88	3	99,29	8	99,5

2.1.5. Inovasi

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1				
2				

2.1.6. Prestasi/Penghargaan

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasiona l	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6

2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	4	5

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	4	5

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan
Kecamatan Pasimarannu tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan yang dimaksud.

3.2. Hambatan – Hambatan
Permasalahan

Pada Tahun 2022 Pandemi Covid-19 masih berlangsung. Hampir seluruh kegiatan sosial kemasyarakatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dua tahun sebelumnya. Nyaris pada saat bersamaan kondisi ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Masyarakat tidak lagi mampu secara normal untuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Demikian halnya di pelayanan Kantor Kecamatan Pasimarannu, seluruh kegiatan administrasi cenderung mengalami penurunan pelayanan masyarakat. Hal ini diakibatkan adanya kekhawatiran masyarakat akan penularan covid-19.

Secara umum permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pasimarannu adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia yang belum optimal;
2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai;
3. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah.

Solusi

Kecamatan Pasimarannu mencoba untuk memahami kondisi perekonomian masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. Ini

dilakukan untuk memberikan dukungan moril maupun materil serta usaha-usaha dalam meningkatkan perekonomian pada kondisi sekarang ini.

Penanganan Covid-19 di Kecamatan Pasimarannu telah dilakukan bersama stakeholder terkait dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan vaksinasi. Hal ini diharapkan dapat menurunkan kekhawatiran masyarakat Pasimarannu dalam melakukan aktifitas termasuk didalamnya mendapatkan pelayanan maksimal di Kantor Kecamatan Pasimarannu.

Dukungan APBD 2022 yang ada dimanfaatkan secara tepat guna dan berhasil guna demi mencapai target organisasi yang diharapkan. Aktifitas pemerintahan diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pembangunan daerah. Melalui pendekatan kebutuhan diharapkan APBD pada tahun berikutnya lebih dapat mengakomodasi keperluan kewilayahan.

Secara umum solusi yang dilakukan adalah :

1. Mengoptimalkan Dukungan Sumber Daya Manusia;
2. Mengefektifkan fasilitas yang tersedia guna menyelesaikan program dan kegiatan kecamatan;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya peran wanita dan berusaha menjaga hubungan dengan Tokoh Masyarakat , Agama, Pemuda yang ada di Wilayah Kecamatan Pasimarannu.

BAB IV PENUTUP

Dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Pasimarannu telah menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).

Laporan ini dibuat secara partisipatif, dengan berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kecamatan Pasimarannu Tahun 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kecamatan Pasimarannu demi terciptanya tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlu ada komunikasi dan kerjasama agar dalam penyelesaian program dan kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dibuat secara kontinyu untuk mengetahui jumlah anggaran yang digunakan dan terealisasinya dalam setiap program dan kegiatan khususnya di Kecamatan Pasimarannu.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang telah dibuat bersama-sama ini dapat menjadi motifasi untuk mencapai tujuan akhir bersama Amien.

CAMAT PASIMARANNU,

SYAMSIL, S.Sos

Pangkat : Pembina

NIP : 19680204 198903 1 009